

Nomor : BF.HM01.635  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Bukti Pengumuman RUPS Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

7 Februari 2017

Kepada Yth.  
**Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia**  
The Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1  
Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

u.p. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2**

Bersama ini terlampir kami sampaikan Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Bukti Pemasangan Iklan Pengumuman RUPS Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang telah diiklankan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 melalui 2 (dua) harian surat kabar yaitu, Bisnis Indonesia dan Investor Daily dan telah kami *upload* melalui website [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com).

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Mohammad Sofyan**  
Corporate Secretary

SDH/SYE/any  
*SDH*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Jakarta 13550 - Indonesia  
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630  
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540  
jasmar@jasamarga.com  
www.jasamarga.com

▶ PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK.

# Transformasi Pemicu Stabilitas

Analisis Danareksa Sekuritas Adeline Solaiman dan Natalia Sutanto mengungkapkan, transformasi dari Robinson ke SPAR telah mendorong kinerja positif bisnis supermarket Ramayana. Ekspansi yang cenderung stabil berpotensi meningkatkan margin kotor emiten tersebut hingga 84bps sepanjang tahun ini.

## Proyeksi Kinerja PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.

Keterangan	2016	2017	2018
• Pendapatan (Rp Triliun)	576	6,09	6,51
• EBITDA (Rp Miliar)	548	595	638
• Pertumbuhan EBITDA (%)	30,9	8,6	7,1
• Laba Bersih (Rp Miliar)	396	468	513
• EPS (Rp)	56	66	73
• Pertumbuhan EPS (%)	17,8	18,2	9,6
• PER (x)	22	18,6	16,8
• PBV (x)	3,5	3,3	3,1
• Dividend yield (%)	1,8	2,1	2,4
• EWEBITDA (x)	14,1	12,8	11,8



Novita Sari Simamora  
novitasari.simamora@sinli.com

▶ Transformasi bisnis yang dilakukan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. telah membuat emiten perdagangan acuan menjadi saham pilihan tahun ini.

▶ Sejak menjadi anggota organisasi SPAR Internasional B.V asal Belanda pada 2014, margin kotor emiten bersandi saham RALS ini semakin menggemuk.

elain melakukan transformasi menjadi anggota SPAR, emiten perdagangan acuan ini juga merancang pembelian langsung bisnis fesyen. Pemasaran yang agresif disertai dengan campuran produk membuat pendapatan fesyen semakin tinggi. Setelah mengadakan transformasi dari toko *offline*, Ramayana juga meluncurkan kampanye #KerenHakSegalaBisa yang menjadi platform di berbagai media sosial baik Facebook, Youtube dan Instagram. Kampanye *online* digitar dengan memanfaatkan bonus demografi penduduk Indonesia yang gemuk di profil penduduk berusia kurang dari 25 tahun dan aktif menggunakan media sosial.

Setelah sukses dengan kampanye #KerenHakSegalaBisa, kini Ramayana melakukan gerakan terstarnya dalam *fastlan*, berkolaborasi dengan *official partner* Disney, melayangkan kampanye #DisneyHakSegalaBisa. Melalui kampanye ini, perusahaan ingin merebut hati masyarakat, khususnya pejalan Disney, untuk memilih produk Disney berlisensi dengan harga terjangkau.

"Danareksa Sekuritas memproyeksikan *earnings per share* (EPS) RALS berpotensi tumbuh 17% sepanjang 2017. RALS pun menjadi saham pilihan dengan kendali neraca yang kuat," tulis Danareksa dalam riset medio Januari 2017.

### STRATEGI BARU

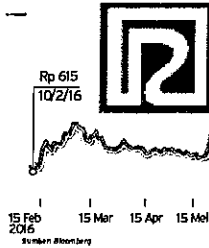
Analisis PT Mitra Asset Sekuritas Indonesia Christine Naitany mengungkapkan, RALS memasing target

pertumbuhan penjualan hingga 20% pada tahun ini dan tahun berikutnya. Dia menuturkan, strategi baru yang dilakukan Ramayana pada tahun ini yakni *re-plate* produk-produk yang kurang laku dengan produk yang banyak diminati masyarakat.

Christine menuturkan produk yang banyak diminati masyarakat di Ramayana yakni *fastlan* dan *Homeped*. Produk yang diminali akan diperbanyak guna menggenjot penjualan. Dia memprediksikan indeks kepercayaan konsumen tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terlebih, *semester sales growth* (SSSG) masih bagus dan melanjutkan pertumbuhan dari tahun lalu.

Kendati begitu, ke depannya, untuk menekan kanibalisme emiten perdagangan acuan pada 2017, sebaiknya RALS menahan diri untuk tidak membuka toko baru dalam jumlah banyak. Sepanjang 2017, perusahaan berencana membuka sekitar empat gerai - enam gerai baru.

Menurut Christine, RALS pada 2017 fokus memusatkan toko dan bertransformasi untuk memperbaiki margin pertumbuhan penjualan. Mitra memproyeksikan pendapatan peremaran



## Pergerakan Harga Saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.

pada 2017 bakal mencapai Rp8,82 triliun dan laba bersih mencapai Rp1,44 miliar.

Direktur Ramayana Lestari Sentosa Suryanto mengungkapkan, SSSG pada 2016 tidak mengalami penurunan, akan tetapi mencatatkan peningkatan yang signifikan. Dia menuturkan, peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada peremaran tahun karena adanya momen Lebaran.

"Proyeksi SSSG kami pada 2017 yaitu 8,2%. Kami akan menambah 6 toko baru," kata Suryanto.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2016, emiten bersandi saham RALS mencatatkan penjualan senilai Rp4,56 triliun, tumbuh 7% dari posisi Rp4,26 triliun pada periode yang sama

tahun sebelumnya. Pada September 2016, laba komprehensif mencapai Rp362,55 miliar, tumbuh 20% dari posisi Rp302,08 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Analisis Samuel Sekuritas Indonesia Mirreze Tamubandja menilai akan dalam riset belum lama ini, peningkatan margin emiten periode saham RALS disebabkan oleh perubahan struktural pada bisnis supermarket dan pakalan, serta efisiensi perusahaan pada tingkat operasional.

Samuel Sekuritas pun optimis margin laba kotor dan bersih RALS masih mampu tumbuh seiring keseriusan manajemen untuk meningkatkan *traffic* dan produktivitas. Dia pun

menilai kinerja RALS bakal positif hingga 2017.

Selain itu, RALS sedang memperbaiki kinerja supermarket di bawah naungan label SPAR, setelah perubahan strategi *merchandise mix*, di mana manajemen lebih memperhatikan porsi barang lahan lama.

Mirreze optimis laba lintas RALS akan mendorong seiring dengan besarnya permintaan masyarakat akan kebutuhan barang-larung *fastlan* dan barang tahan lama untuk memenuhi kebutuhan harian.

Danareksa dan Mirreze merekomendasikan *buy* untuk saham emiten ritel ini. Perubahan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan transformasi menjadi kunci sekaligus bisnis Ramayana. ■

## ▶ KERJA SAMA MULTI SEKTOR



Gubernur Sulut Otty Dondokambey (kedua kanan) dan Wakil Gubernur Steven Kandow (kiri) berbincang dengan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Bintang Perbowo (kedua kiri) dan Direktur Keuangan Steve Kosasih sehubungan penandat-

ngan kerja sama di Jakarta, Jumat (3/2). Kerja sama tersebut dalam hal pembangunan pelabuhan, pembangkit listrik, Kawasan Ekonomi Khusus dan properti di Manado, Bitung dan Lilipang, Sulawesi Utara.

## ▶ KINERJA EMITEN

# MPM Target Laba Tumbuh 25%

JAKARTA — PT Mitra Finastika Mustika Tbk., emiten di bisnis asuransi produk industri otomotif, menargetkan laba tumbuh 20% - 25% pada tahun ini seiring dengan upaya konsolidasi lini bisnis perusahaan.

Perusahaan berkode saham MPMX ini optimis bisa melanjutkan tren positif yang diorehkan selama tiga kuartal pertama tahun lalu.

"Untuk laba bersih MPMX bisa tumbuh 20%-25%," ujar Agung C. Kusumo Managing Director MPM dalam jawaban tertulis kepada *Eksis*, akhir pekan lalu.

Sepanjang Januari sampai September 2016, MPMX sukses membuktikan pendapatan sebesar Rp13,2 triliun, naik 9% dibandingkan capaian periode sama tahun sebelumnya (*year on year*).

Dengan upaya itu, MPMX diharapkan bisa memetik pertumbuhan pendapatan 10% pada tahun ini. Persepsi berencana menggenjot *tingkat efisiensi* operasional. Selain itu, perusahaan juga akan fokus meningkatkan kolaborasi antar lini bisnis, mengoptimalkan *core leadership*, serta memperkuat seluruh proses bisnis di segala segmen.

Untuk aksi korporasi, MPMX pada akhir bulan lalu mengumumkan bahwa anak usaha MPMRenx melepas seluruh kepemilikan di PT FPG Insurance Indonesia, perusahaan asuransi umum di bawah Zuellig Group.

Penandatanganan perjanjian jual beli saham telah dilaksanakan pada 16 Desember 2016, dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Desember 2016, dengan pengesahan dokumen oleh OJK diterima oleh MPMRenx pada 25 Januari 2017.

Namun, pihak MPMX enggan memberikan informasi detail terkait nilai penjualan kepemilikan tersebut.

Pada saat ini kami tidak dapat menyebutkan nilai penjualan saham MPMRenx di PT FPG Insurance Indonesia dikarenakan transaksi yang dilakukan dengan pihak privat," ujarnya.

Di sisi lain, perusahaan meyakini jika nilai penjualan tersebut masih di bawah *threshold* transaksi material MPMX. Dengan melepas saham pada FPG Insurance, MPMRenx diharapkan lebih fokus menambah nilai lebih

di bidang logistik. Sepanjang tiga kuartal pertama pada tahun lalu, MPMRenx membuktikan pertumbuhan laba bersih sebesar Rp16 miliar. Kontribusi MPMRenx terhadap laba bersih yang diatribusikan kepada emiten induk (NIMTMI) MPMX adalah sebesar 4%.

Saat ini, MPMRenx menggerakkan bisnis perantara kendaraan dan memiliki 34 kantor perwakilan di Indonesia.

### DIVESTASI

MPMIX juga berniat melepas sebagian saham PT Mitra Finastika Mustika Finance (MFMFinance) kepada mitra strategisnya JACCS Co. Ltd. Rencana penjualan saham tersebut akan ditandatangani dengan penandatanganan perjanjian definitif.

Melalui rencana divestasi, MPMX akan menjual sebanyak 20% saham kepada JACCS. Alhasil, kepemilikan MPMX berkurang dari 60% menjadi 40%, sedangkan JACCS akan memegang kendali mayoritas dengan persentase 60%. MFM Finance saat ini mempunyai 100 orang cabang dan outlet di seluruh Indonesia. ■

## ▶ ANAK BUMN

# Pertamina Matangkan Rencana IPO Tugu Pratama

JAKARTA — Manajemen PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menyelesaikan rencana bisnis sebelum anak usaha perseroan, PT Tugu Pratama Indonesia, melakukan penawaran umum saham perdana atau *initial public offering* (IPO).

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan, pihaknya akan mengambil situasi pasar terlebih dahulu sebelum perusahaan asuransi umum itu melakukan IPO.

"Kami akan *financing business plan* dulu," katanya ketika di media di Gedung Kementerian BUMN, pekan lalu.

Arief mengatakan, apabila memungkinkan Tugu Pratama Indonesia akan melakukan IPO pada 2017. Seperti diketahui, rencana IPO anak usaha Pertamina itu sudah disiapkan sejak

kebijakan pengampunan pajak pada pertengahan 2016. Namun, sampai saat ini, rencana aksi korporasi itu juga belum terrealisasi. Rencana IPO anak usaha BUMN lainnya yaitu PT IJK Realindo yang dimiliki oleh PT Hutama Karya (Persero), juga belum terwujud.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, target dana (*proceeds*) dari rencana IPO Tugu Pratama Indonesia mencapai US\$220 juta atau sekitar Rp2,8 triliun (kurs US\$1 = Rp13.110). Jumlah saham yang dijual kepada investor mencapai sekitar 40% dari modal disetor dan ditempatkan penuh di perusahaan itu.

Dana yang diperoleh dari investor pasar modal itu rencananya akan digunakan oleh perusahaan untuk penguatan usaha ke sektor ritel. Perusahaan ini sekarang

Berdasarkan data di situs perseroan, pemegang saham Tugu Pratama Indonesia antara lain Pertamina dengan porsi kepemilikan 65%, PT Sakti Laksono Prima 17,6%, Sili Tasdyah 12,15% dan Moehamad Soya Permedi 5,25%.

Seperti diketahui, rencana IPO anak usaha Pertamina telah muncul sejak beberapa tahun lalu, tetapi belum ada yang terrealisasi sampai saat ini.

Selain Tugu Pratama, sejumlah anak usaha Pertamina yang bergerak di berbagai sektor disebut-sebut akan melakukan IPO.

Salah satunya adalah PT Pertamina Lubrifikasi yang merupakan anak perusahaan Pertamina yang fokus dalam menjalankan bisnis pelumas Pertamina. Pemisahan unit bisnis pelumas menjadi perusahaan tersendiri dilakukan

**DISEWAKAN**  
**GUDANG**  
• Luas 200 m2 s.d 3.000 m2  
• Bebas banjir Security 24 Jam, PAM, Telepon, Lempar  
• Dik. Dulu komplek 40  
• Dekat dengan  
Tanjung Priuk  
• Lokasi Jl. Arcof Barat

**RUANG KANTOR**  
• Luas 40 m2 s.d 1.500 m2  
• Full Furnish  
• PAM, PAM, Telepon, AC, Lempar  
• Security 24 Jam  
• Air PAM dan PAM  
• Lokasi Jl. Pemuda  
• Komplek Kantor Pda  
(Bekas)

Tanya Penawaran  
Hub: Marwati

**JASAMARGA**  
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.  
**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/2014, Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2017. Selain itu Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 pada pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Perantara Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 20 Februari 2017.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/2014, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah: 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih

# Produksi Batubara Ditargetkan 470 Juta Ton

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan produksi batubara pada 2017 mencapai 470 juta ton. Namun penentuannya masih menunggu hasil konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan total produksi 470 juta ton itu berdasarkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang telah disetujui. Hanya saja jumlah produksi itu melampaui rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN, total produksi tahun ini ditetapkan sebesar 413 juta ton.

"RKAB ini sekitar 470 juta ton dan kenyataannya pemerintah memang akan susah menolaknya ke 413 juta ton. Itu yang akan ditunjukkan ke Bappenas," kata Bambang di Jakarta, akhir pekan lalu.

Bambang menurukan jumlah produksi 470 juta ton merupakan RKAB ini diajukan oleh pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun dia enggan merinci jumlah produksi tersebut. Bambang hanya bilang salah faktor yang membuat produksi melonjak ialah sekitar 3.000 IUP yang masuk tetap produksi. Dari 6.000 IUP berstatus Clear and Clean (CnC) hampir separuhnya menulangi produksi tahun ini. "Yang mau naik ke tahap produksi banyak sekali, 3000-an IUP CnC," ujarnya.

Kemendauran ESDM, lanjut Bambang, tidak bisa mengontrol kegiatan IUP tersebut. Pasalnya kewenangan penentuan produksi berada di tangan pemerintah daerah. Pihaknya hanya bisa mengontrol produksi IUP yang masuk tetap produksi.

Sementara itu, Deputy Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sindaia menurukan pemerintah sebaiknya merevisi target RPJMN. Pasalnya realisasi produksi dua tahun terakhir tidak pernah sesuai target. Sebagai contoh realisasi produksi batubara nasional tahun lalu mencapai 434 juta ton. Padahal target yang ditetapkan sebesar 419 juta ton. "RPJMN perlu ditinjau kembali," tuturnya.

Hendra menurukan meningkatnya tingkat produksi tahun ini seiring dengan membaiknya harga batubara. Bahkan sempat menembus hingga lebih dari US\$100 per ton di akhir 2016 kemarin. Hal ini membuat pelaku usaha optimis di 2017 dan mengarahkan kembali sektor ini.

"Tingginya tingkat produksi tersebut juga sudah mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah yang masih menggunakan IUP yang masuk tetap produksi dari sektor batubara," ujarnya. (rap)



**Kebiasaan Bahan Bakar**  
Sejumlah pemangkas KM Mutiara Sentosa berlibur ketika beranda di Dermaga Gapura Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/2). Sekitar 180 penumpang dari KM Mutiara Sentosa 1 tujukan Balikpapan - Surabaya tersebut terbimbing-ambing selama 30 jam di Perairan Karang Lamang, Gresik akibat hambatan bahan bakar.

# Jonan Dinilai Mengulangi Kegagalan Kebijakan Tarif EBT

JAKARTA - Kebijakan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam menurunkan tarif energi baru terbarukan (EBT), mengundang kepelitiran para investor. Pasalnya, pembatasan tarif EBT sebesar maksimal 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP), mengulangi kebijakan serupa yang pernah gagal.

Seperi disampaikan Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darmo, pembatasan tarif EBT sebesar 85 persen Biaya Pokok Produksi (BPP), pernah dilakukan melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

"Ketika itu, pemerintah juga mengulangi kebijakan tentang pembatasan yang besarnya juga 85 persen dari BPP. Nyatanya, Permen itu gagal dan akhirnya diganti. Jadi sulit dimengerti, mengapa Menteri ESDM sekarang justru mengulangi kegagalan tersebut," kata Surya di Jakarta, Minggu (5/2).

Hal itulah yang menurut Surya, membuat investor prihatin. Sebab, saat ini Jonan justru kembali memberikan kebijakan tersebut. Melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan untuk Penyediaan Listrik, pemerintah menetapkan patokan harga maksimal untuk listrik dari tenaga matahari, angin, air, biomassa, biogas, sampah, dan panas bumi. "Ketika kemarin saya

## REVISI PP 79/2010

# Pemerintah Beri Insentif Proyek Tak Ekonomis

Oleh Retno Aynimlingtya

► JAKARTA - Pemerintah bakal memberikan insentif bagi proyek migas yang keekonomiannya dibawah patokan. Pemerintah menghitung proyek migas yang termasuk ekonomis yakni yang memiliki tingkat pengembalian modal (*internal rate of return/IRR*) sekitar 12%.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratama membenarkan bahwa revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 soal biaya investasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) bakal memuat subsidi insentif bagi proyek migas yang tidak ekonomis. Namun, pemberian insentif berdasarkan pertimbangan Menteri ESDM. "Keekonomian proyek migas itu dihitung dari IRR, dari diskusi-diskusi sekitar 12% (IRR ekonomis)," kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Nantinya, lanjut Wiratama, kriteria proyek migas yang berhak memperoleh insentif ini bakal ditunjukkan dalam aturan turunan revisi PP 79/2010. Aturan turunan berupa peraturan menteri ini bakal diterbitkan

rapat di Kantor Wapres, asosiasi menyampaikan prihatin dengan Permen itu. Artinya, Permen tersebut memang perlu dievaluasi," lanjut Surya.

Keprihatinan investor, menurut Surya, karena ketidakjelasan pemerintah dalam menetapkan pembatasan tersebut. Pasalnya, selain kondisi yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, besaran BPP akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, proses pembangunan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Untuk komisioning saja, kata dia, baru bisa dilakukan 3-4 tahun mendatang. "Kalau sudah demikian, BPP mana yang dihitung? Yang 3-4 tahun akan datang atau yang sekarang? Kalau yang sekarang, berapa dihitung dari pembangkit yang dibangun sekitar 5-10 tahun lalu, dan itu sudah pasti biayanya lebih rendah," urainya.

Di sisi lain, Surya juga mempertanyakan, menapa justru EBT yang harus dibangun dan dikembangkan. Padahal, melihat porsi EBT dalam sumber energi pembangkitan pun sebenarnya sangat kecil. Saking kecilnya, kalau pun porsi EBT ditingkatkan, tentu pengeluarannya beban keuangan negara tidak terlalu besar. "Pembatasan itu bertolak belakang dengan yang diberlakukan di harga jual belahan bumi. Di sana, EBT mendapat insentif, mungkin khusus, yaitu 100 persen plus/minus, sedangkan di sini minus-minus," kata dia.

segera setelah revisi beleid *cost recovery* itu. Namun prinsipnya, proyek tidak ekonomis yakni yang memiliki IRR dibawah 12%. Proyek-proyek ini bakal diberikan insentif. "Lagi didiskusikan (spesial) memperoleh insentif atau tidak," jelasnya.

Dalam draft revisi PP 79/2010 yang diperoleh, terdapat pasal khusus yang menaungi insentif fiskal yang bisa diperoleh perusahaan migas. Insentif ini diberikan untuk proyek migas tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi.

Pada tahap eksplorasi, proyek migas bakal dibebaskan dari pungutan Bea Masuk atas impor barang yang digunakan dalam kegiatan migas. Insentif lainnya yakni Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan barang mewah yang terutang tidak akan dipungut, tidak dilakukan

pengungutan Pajak Penghasilan atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan Bea Masuk, serta pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 100% dari yang terutang yang tercantum dalam SPPT selama masa eksplorasi.

Insentif yang sama juga dapat diperoleh perusahaan migas yang proyek migasnya sudah masuk tahap eksploitasi. Tahap eksploitasi ini termasuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi. Hanya saja fasilitas perpajakan proyek tahap eksploitasi ini hanya diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek, serta menerapkan konsep *sharing the pain and the gain*.

PP 79/2010 perlu direvisi lantaran menjadi penghambatan investasi migas nasional. Jita tidak dicarikan solusi, beleid ini bakal membuat kegiatan hulu migas terus berkurang yang tercermin dari terus menurunnya produksi minyak dari 800 ribu barel per hari (bph) pada tahun ini dan diprediksi menjadi 400 ribu bph pada 2020. Penurunan ini bukan hanya lantaran sumbu migas yang sudah tua, tetapi juga tidak adanya kegiatan eksplorasi.

Untuk bisa mengetahui apakah masyarakat tersebut dapat dari pembatasan subsidi listrik, akan diketahui ketika membeli voucher listrik. Jika harganya naik berarti warga tersebut termasuk golongan mampu, namun jika tidak sesuai bisa melaporkan melalui aplikasi.

"Laporkan saja jika merasa bermasalah, nanti jika memang sesuai maka subsidi akan diberikan, tetapi tidak berarti jika melapor sesuai akan mendapatkan subsidi, tidak akan disesuaikan

Dalam Permen no 10/2017 tentang pembatasan tarif tenaga listrik, jika tidak sesuai aturan atau bahkan Power Purchase Agreement (PPA) bisa batal.

Permen no 10/2017 menguraikan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) antara pembeli (PLN) dengan penjual (IUP) terkait aspek komersial untuk seluruh jenis pembangkit termasuk Panas Bumi, PLTA dan PLT Biomassa. Sementara, pembangkit EBT yang intermitten dan Hidro dibawah 10 MW diatur dalam peraturan sendiri.

Dalam hal ini jika penjual tidak dapat menyalurkan energi listrik sesuai kontrak karena kesulitan teknis, maka penjual wajib membayar nilai kepada PLN. Finalnya proporsional sesuai biaya yang dikeluarkan PLN untuk mengangkut energi yang tidak dapat disalurkan.

Sejuri dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (ESRS), Faby Tumwa menanggapi, untuk mengesakan aturan terhadap pembangkit.

Namun, terkait dengan peraturan energi terbarukan (Peraturan no 12 tahun 2017) ia berpendapat bahwa aturan tersebut perlu dikaji kembali. Menurutnya, pembelian listrik maksimal 85 persen dari biaya pokok produksi tetap berpotensi mengurangi

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

konstruksi pembangkit tenaga listrik. "Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Peraturan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Informasi Lalulintas | Informasi Lalulintas | Informasi Lalulintas



Hubungan Investor



Info Perusahaan



Aktivitas



CSR

Berita

Pengumuman

- + Release
- + Berita
- + Pengumuman
- + Tender

## PENGUMUMAN RUPS TAHUNAN 2017



PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan"); dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014, Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2017. Selain itu Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)).

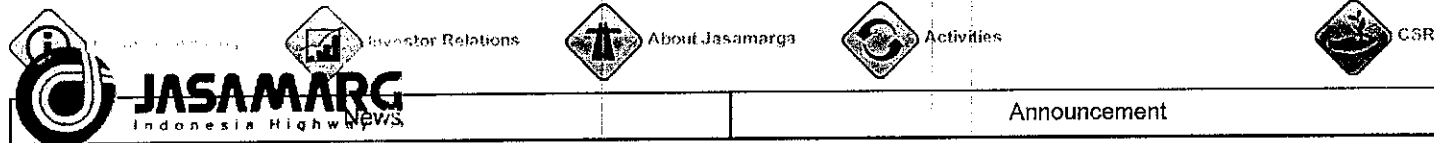
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 pada pukul 16:15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 20 Februari 2017.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 14 Februari 2017.

Jakarta, 6 Februari 2017

Direksi Perseroan

## Informasi Lainnya



- + Release
- + News
- + Announcement
- + Tender

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

## ANNOUNCEMENT

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("the Company") herewith would like to inform its Shareholders that the Company will convene the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") in Jakarta on Wednesday, 15 March 2017.

Pursuant to the provisions of Article 22 Paragraph 2 of the Company's Articles of Association and Article 13 Paragraph 3 of Regulation of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) No. 32/POJK.4/2014, the Invitation of the Meeting will be announced in two (2) daily newspapers in Indonesian Language, on Monday, 21 February 2017. Such Invitation will also be available at the website of the Indonesia Stock Exchange and the website of the Company ([www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)).

Those who are entitled to attend or represented in the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on Monday, 20 February 2017 at 16:15 WIB (Western Indonesia Time) or holders of Securities Account balance in Indonesian Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI) at close of trade on 20 February 2017.

Pursuant to the provisions of Article 12 Paragraph 2 Regulation of OJK No. 32/POJK.4/2014, the Shareholders who are dapat mengusulkan the agenda of the Meeting are one (1) or more Shareholders representing 1/20 (one-twentieth) or more than the total Shares of the Company with voting rights. Each of the Shareholders' proposal will be included in the agenda of the Meeting only if such proposal complies with the requirements based on Article 12 of Regulation of OJK No. 32/POJK.4/2014 and is received by the Directors of the Company at least seven (7) days prior to the date of the Invitation of the Meeting on 14 February 2017.

Jakarta, 06 February 2017

The Directors of the Company